



ZONA INTEGRITAS



BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

AREA VI
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK



ZONA INTEGRITAS

REFORM:

Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi

DAFTAR ISI

1. Screenshot Pengaduan Pelayanan via Fitur SP4N-LAPOR!
2. Screenshot Pengaduan Pelayanan via Fitur Whistleblowing System
3. Screenshot Fitur Pengaduan Pelayanan di Website MK dan Medsos
4. Screenshot Pengaduan Pelayanan via Fitur Tanya Jawab
5. Screenshot Pengaduan Pelayanan via Fitur Kirim Surat
6. Screenshot Pertanyaan Seputar Magang di Website MK



Mahkamah Konstitusi

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 021-23529000 office@mkri.id

9 pengikut

IKUTI

Sampaikan Laporan Anda

Pilih Klasifikasi Laporan

PENGADUAN ASPIRASI PERMINTAAN INFORMASI

Perhatikan Cara Menyampaikan Pengaduan Yang Baik dan Benar ?

Ketik Judul Laporan Anda untuk Mahkamah Konstitusi *

PENILAIAN



- ★★★★★: 0 Laporan
- ★★★★☆: 0 Laporan
- ★★★☆☆: 0 Laporan
- ★★☆☆☆: 0 Laporan
- ★☆☆☆☆: 0 Laporan



Whistleblowing System

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi RI

[Beranda](#)[Cara Melapor](#)[Hubungi Kami](#)[Ganti Password](#)[Login](#)[Laporan](#)

Selamat datang di

Whistleblowing System

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena Mahkamah Konstitusi akan **MERAHSAKANKAN IDENTITAS DIRI ANDA sebagai whistleblower. Mahkamah Konstitusi menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan.**

Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Mahkamah Konstitusi, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Kriteria Pengaduan

- Menjelaskan **siapa**, melakukan **apa**, **kapan**, **di mana**, **mengapa** dan **bagaimana (4W + 1H)**.
- Diharapkan dilengkapi dengan **data sumber informasi** untuk pendalaman.



Jakarta, Humas MKRI Sidang Lanjutan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang

Kamis, 07 April 2022 | 13:54 WIB
 Sejumlah Pencipta Konten Persoalkan Unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

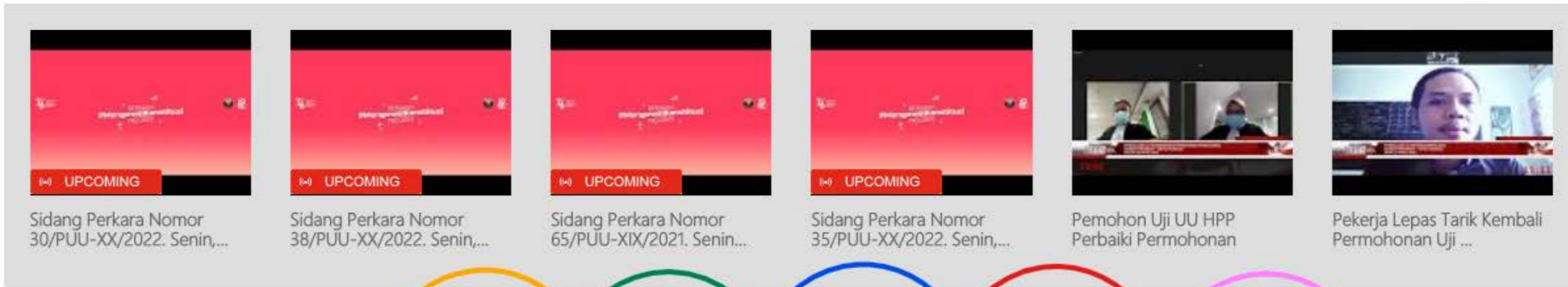
Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (Mk) Menggelar Sidang Pertama Uji Undang-Undang

Kamis, 07 April 2022 | 13:25 WIB
 Menguji Ketentuan Pengisian Penjabat Kepala Daerah Sementara dalam UU Pilkada



Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



2352-9000
 Jl. Medan Merdeka Barat No.6. Jakarta Pusat 10110
 Fax: 021-3520177. Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT **TANYA JAWAB** **WHISTLEBLOWING** **HUBUNGI MK** **MEDIA SOSIAL** **PENGUNJUNG**



TANYA JAWAB

Kirim Pertanyaan

Nama :

Email :

Pertanyaan :

Kode Keamanan : 

Kirim

KIRIM SURAT

Kirim Surat

Nama :

Email :

Prihal :

Isi Surat :

File : No file chosen

Kode Keamanan : 